

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KESEHATAN



Jl. Ki. Hajar. Dewantara NO. TELP.(0474) 321 489

M A L I L I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR
NOMOR : 430 / 02 / SK / DINKES / 2020

TENTANG

SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)/
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Fisik dan Non Fisik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu diangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa pegawai tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Perubahan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP GU dan SPP-TU serta SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPD;
 - g. menyiapkan laporan keuangan;
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - k. mengendalikan Kontrak;

- l. melaporkan pelaksanaan dan menyelesaikan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan keseluruhan dokumen pelaksanaan kegiatan;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 2 Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS,



dr. Hj. ROSMINI PANDIN, MARS
PANGKAT : REMBINA TK I
NIP: 19690909 200112 2 001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Luwu Timur

Nomor : 430/ 02 / SK/ DINKES

Tanggal : 2 Januari 2020

**SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)/
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN	KET
I	PURNAWATI DAVID, SKM. M.kes	PPK (PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN)	-	
1	NELLI MUALIM, SKM	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)	<p>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</p> <p>1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</p> <p>4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</p> <p>5 Penyediaan Alat Tulis Kantor</p> <p>6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</p> <p>10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</p> <p>11 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis</p> <p>12 Kunjungan Kerja Dalam Daerah</p> <p>13 Penyediaan Makan Minum</p> <p>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</p> <p>1 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor</p> <p>2 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional</p>	

			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	
			1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
2	USWATUN HASANAH, S. Pd	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	
			1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	
3	NURHASIBAH, SKM	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	
			1 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran SKPD	
			2 Penyusunan Profil/Database Perencanaan dan Penganggaran SKPD	
4	FITRIANI, S.Si	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	
			1 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	
			PROGRAM PENGELOLAAN OBAT, PERBEKALAN KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN	
			1 Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan Perbekalan Kesehatan	
5	NIRWANI RUM, SKM	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
			1 Upaya Pelayanan Kesehatan Sekolah	
			2 Pengembangan Masyarakat Pola Hidup Sehat	
			3 Pengembangan Upaya Pemberdayaan Masyarakat	

6	HAJAR, SKM	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 2 Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja
7	H. JUNAEDI, SKM. M. Kes	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1 Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA 1 Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja 2 Pelayanan Kesehatan Olahraga
8	WARDAN, SKM. M. Kes	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1 Penyemprotan/fogging Sarang Nyamuk 2 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik 4 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Zoonosis
9	JUMARDI, SKM	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah 2 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Peanggulangan Wabah

10	KASMAWATI, SKM	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
			1 Pengembangan dan Pemuktahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
			2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji
			3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan
			PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
			1 Pembangunan Puskesmas Pembantu
			2 Pengadaan Puskesmas Keliling
			3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
			4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu
			5 Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap
			6 Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas
			7 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu
			PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
			1 Pembangunan Rumah Sakit
11	YUSNIATI, SKM	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
			1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
			2 Peningkatan Pelayanan Kegawatdaruratan
			3 Pelayanan Standarisasi Pelayanan Kesehatan

12	NURBAYA, SKM. M.Kes	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1 Penguatan Pelayanan Kesehatan 2 Pengelolaan Dana JKN di FKTP PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 1 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 2 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
13	RIANTO TONAPA, SKM	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)	PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 1 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 2 Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk Usia Produktif
14	MUHSIN, SKM	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan 2 Pemuktahiran Data Sumber Daya Manusia Kesehatan
15	ISHAK, S. Si	PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN)	PROGRAM PENGELOLAAN OBAT, PERBEKALAN KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN 1 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan
16	BASO SIMUN, SKM	PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN)	PROGRAM PENGELOLAAN OBAT, PERBEKALAN KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN 1 Pengadaan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan
17	YETRIANI BOSA, SKM. M.Kes	PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

18	AFDAL ANAS, Arnd. KL	PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN)	KEGIATAN PENGADAAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
			1 Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat
			- Sanitarian KIT
			- Kesling KIT

Pt. Kepala Dinas,



dr. Hj. ROSMINI PANDIN, MARS

PANGKAT : PEMBINA TK I

NIP: 19690909200112 2 001